

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan merupakan bagian dari masalah penting yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan hubungan sosial antar manusia¹. Kemiskinan menjadi permasalahan hidup yang sejak dahulu dihadapi oleh mayoritas manusia. Kelompok orang yang berada dalam lingkaran kemiskinan merupakan kelompok masyarakat yang berada pada level yang paling rendah. Keadaan mereka menjadi sumber munculnya beberapa penyakit masyarakat. Kemiskinan dapat mendorong orang-orang yang termasuk di dalam lingkaran kemiskinan untuk melakukan berbagai macam tindak kejahatan, demi mendapatkan kebutuhan hidup². Lingkungan masyarakat yang mayoritas masuk dalam kategori miskin, banyak ideologi ekstrim yang diminati dan semua perbuatan jahat atau haram pun menjadi halal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan ini sudah pernah terjadi pada jaman Jahiliyah dimana orang - orang dengan tega membunuh anak - anak mereka karena perasaan takut terhina oleh kemiskinan. Masyarakat miskin menjalani kehidupan dengan penuh rasa cemas, gelisah, dan duka. Sampai pada akhirnya, Islam datang membawa solusi atas permasalahan di atas.

Islam mewajibkan umat manusia untuk mempunyai kekayaan dalam melawan musuh - musuh Islam. Kemiskinan merupakan musuh umat Islam. Allah SWT, memerintahkan umatnya agar menjadi orang yang mampu keluar dari garis kemiskinan. Apabila kita membaca dan memahami semua ayat dalam Alquran, maka tidak akan ditemukan ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menjadi miskin. Allah itu Maha Penyayang, Dia akan menolong umatnya agar dapat keluar dari segala kesulitan³. Berikut ayat Alquran Surat Al Anfal ayat 60:

¹Mahmud Ahmad Sa'id Al-Athasy, *Hikmah di Balik Kemiskinan* (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 12.

²Alif Thabarah, *Ruh ad-Din as-Islami, Cet. ke-27* (Beirut: Dar al- Ilmi li al-Malayin, 1988), 34.

³Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 26.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ
مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi”.

Allah telah menjamin setiap rezeki manusia yang berupaya untuk memperoleh rezeki-Nya. Termasuk rezeki untuk dapat keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Manusia perlu untuk berusaha berubah menjadi lebih baik apabila ingin nasibnya dirubah oleh Allah SWT menuju ke arah yang lebih baik.

Islam telah mengajarkan tentang penanggulangan kemiskinan. Umat muslim diwajibkan untuk memberikan santunan kepada orang yang hidupnya dalam garis kemiskinan. Seperti perintah dalam Alquran Surat Al – Ma’un ayat 1 – 3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينِ ۚ ۱ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ ۲ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ ۳

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin”.

Sehingga apabila ada umat muslim yang tidak berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan termasuk orang yang mendustakan agamanya. Secara tegas sudah diperintahkan dalam ayat Alquran tersebut dan menjadi pedoman bagi seluruh umat muslim.

Membantu kesulitan yang sedang dialami orang yang terjerat kemiskinan juga termasuk ke dalam perbuatan yang mulia dan akan

mendapatkan imbalan berupa pahala. Dalam hadis shahih yang dirawayatkan oleh Muslim nomor 2699⁴:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَدَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya”.

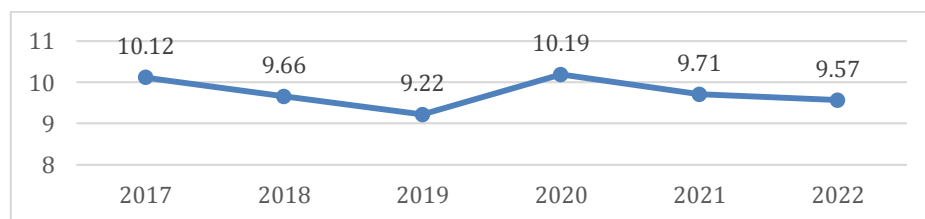
Hadis ini menjelaskan bahwa besarnya pahala yang diterima bagi umat muslim yang melakukan kebaikan dengan membantu kesulitan manusia lainnya. Bagi seseorang yang mempunyai kelebihan harta, alangkah baiknya

⁴Hadits Riwayat Muslim (no. 2699), Ahmad (II/252), Abu Dawud (no. 3643), At-Tirmidzi (no. 2646), Ibnu Majah (no. 225), dan Ibnu Hibban (no. 78-Mawaarid), dari Shahabat Abu Hurairah I. Lafazh ini milik Muslim, n.d.

mencari orang-orang yang mengalami kesulitan khususnya yang sedang mengalami kemiskinan. Selain itu, juga memiliki kepekaan terhadap kondisi orang-orang di sekitarnya dengan memandang dan menanyakan kondisinya. Hendaknya pula dia selalu menjaga harga diri mereka yang membutuhkan bantuannya dengan membuat mereka tidak perlu mendatangi rumahnya, tetapi dia yang mengunjungi mereka.

Sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Islam, Pemerintah Republik Indonesia mengamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 – 4 yaitu: 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3) Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pengentasan kemiskinan di Indonesia masih belum selesai. Meskipun sudah dilaksanakan dengan berbagai program, penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas bagi pemerintahan Republik Indonesia. Capaian penanganan kemiskinan di Indonesia dapat digambarkan melalui prosentase penduduk miskin di Indonesia melalui Gambar berikut:

Gambar 1.1 Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2017 –2022



Sumber: <https://www.bps.go.id/site/resultTab> (data diolah)

Dari gambar di atas, pola penanganan kemiskinan di Indonesia menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan kemiskinan menghasilkan penurunan angka kemiskinan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kebijakan ini tentunya dapat dijadikan program

prioritas dalam penanganan kemiskinan di tahun berikutnya. Namun pada tahun 2020 adanya pandemi Covid -19 yang menyerang dunia, sehingga memiliki dampak negatif terhadap kondisi perekonomian global⁵. Penyebaran Covid-19 ini telah mengakibatkan beberapa negara seperti Tiongkok dan Amerika Serikat menerapkan kebijakan *lockdown* untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Kebijakan *lockdown* ini menyebabkan aktivitas masyarakat dibatasi dan aktivitas perusahaan terhenti sementara. Aktivitas masyarakat dan perusahaan yang dibatasi atau terhenti ini mengakibatkan perusahaan menekan laju produksi sehingga terjadi penurunan pendapatan bagi karyawan bahkan pengurangan tenaga kerja. Dampak ini sekaligus menjadi dampak serius yang menghambat laju pertumbuhan perekonomian global. Kondisi ini mendapatkan perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dampak Covid -19 melalui beberapa kebijakan antara lain: Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan berbagai program tambahan kepada masyarakat, UMKM dan dunia usaha, terutama pada masa penerapan pembatasan aktivitas (*social distancing*)⁶. Dampak positif atas implementasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Covid-19 memberikan hasil di mana terdapat kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 3,69% di tengah penyebaran Covid-19 varian delta⁷. Akselerasi program Pemerintah Indonesia terhadap pemulihan ekonomi di tahun 2021 di mana pandemi yang lebih terkendali dan cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi, sehingga mendorong kepercayaan bagi masyarakat dalam menyambut pulihnya aktivitas ekonomi. Fenomena ini secara khusus dapat menekan angka laju kemiskinan

⁵Michael Christian dan Firman Hidayat, “*Dampak Coronavirus Terhadap Ekonomi Global*,” Bank Indonesia, 2020, 87, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/Bab_5_Artikel_1_2020.pdf, (diakses 25 September 2023).

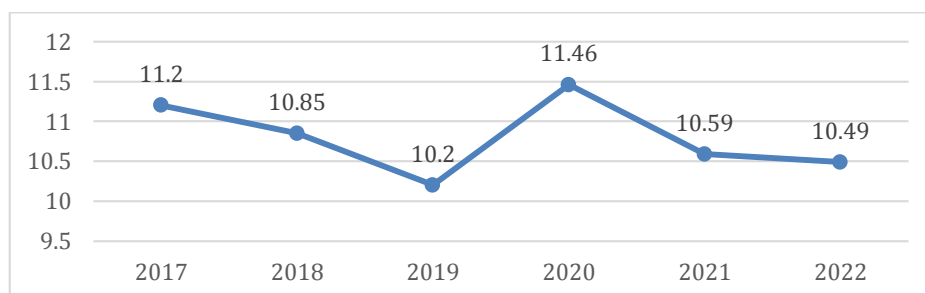
⁶Kementerian Komunikasi dan Informatika, “*Pemerintah Terus Dorong Pengendalian Laju Penyebaran Covid-19*,” Kominfo, 2021, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36050/pemerintah-terus-dorong-pengendalian-laju-penyebaran-covid-19/0/berita>, (diakses 13 Juni 2023).

⁷Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “*Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*,” Kominfo, 2022, [https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran UMKM sangat besar untuk,total penyerapan tenaga kerja nasional](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,total%20penyerapan%20tenaga%20kerja%20nasional), (diakses 13 Juni 2023).

sehingga angka kemiskinan yang semula 10,19 % pada tahun 2020 dapat turun menjadi 9,71 % pada tahun 2021. Pada tahun 2022, kondisi prosentase penduduk miskin secara nasional mengalami penurunan 0,14% menjadi 9,57% yang diasumsikan sebagai salah satu dampak positif penanganan Covid 19 meskipun belum dapat mengcover keadaan kembali pulih sebelum adanya wabah Covid 19.

Sebagai salah satu provinsi penopang perekonomian Indonesia, Provinsi Jawa Timur menunjukkan kinerja antara lain: Provinsi Jawa Timur mempunyai jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur terbesar kedua Nasional, kontribusi Dana Pihak Ketiga dan kredit bank umum di Jawa Timur salah satu yang tertinggi di level nasional, serta realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Timur juga menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia⁸. Oleh karena itu perlu kiranya membahas tentang kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur karena memiliki korelasi dengan Kondisi Perekonomian di Indonesia. Berikut Gambar dari capaian penanganan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang datanya diolah dari Badan Pusat Statistik:

Gambar 1.2 Presentase Penduduk Miskin Prov. Jawa Timur Tahun 2017 –2022



Sumber: <https://www.bps.go.id/site/resultTab> (data diolah)

Berdasarkan pada gambar di atas, maka terjadi fluktuasi prosentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Pola ini hampir sama dengan prosentase penduduk miskin pada level nasional. Akan tetapi kenaikan prosentase secara angka di Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional. Dampak Covid-19 memberikan

⁸ Setyo Tri Wahyudi, M. Khusaini, dan Abdul Manap Pulungan, *Dinamika Ekonomi Pandemi & Perubahannya di Jawa Timur* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), 101.

pengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dengan kenaikan yang signifikan di mana pada tahun 2019 angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 10,2 % sedangkan pada tahun 2020 naik menjadi 11,46%. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur⁹, terdapat penurunan mobilitas Masyarakat tertinggi pada bulan April 2020. Kondisi penurunan mobilitas masyarakat terjadi di beberapa tempat perdagangan ritel, hiburan, taman, dan tempat belanja kebutuhan sehari-hari. Sedangkan di pada lokasi transit serta tempat kerja, penurunan mobilitas masyarakat tertinggi terjadi pada bulan Mei 2020. Pada bulan April dan Mei Tahun 2020, Provinsi Jawa Timur sedang melaksanakan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menghambat penyebaran virus Covid-19. Kebijakan ini memiliki dampak terhadap kemiskinan yang semakin parah. Mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2019, sudah ada hasil dari penurunan jumlah penduduk miskin yang berada pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Namun, dampak dari pandemi Covid-19, kemiskinan di Provinsi Jawa Timur kembali meningkat. Apabila dihitung sejak Bulan September 2019 sampai dengan Bulan September 2020, tercatat sejumlah 529.970 jiwa penduduk di Provinsi Jawa Timur menjadi miskin.

Pada Tahun 2021 angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur membaik dengan angka kemiskinan menurun di level 10,59%. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, pada periode Bulan Maret 2021 hingga Bulan September 2021, angka kemiskinan mengalami penurunan di Provinsi Jawa Timur sejumlah 313.130 jiwa¹⁰. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan manfaat dari kinerja dan kolaborasi dari peran semua elemen pada waktu pandemi Covid-19 menghasilkan menurunnya

⁹A. Baihaqi, "Akibat Covid, Kemiskinan di Jatim Meningkat selama Maret-September 2020," *JatimNet* 2021 <https://jatimnet.com/akibat-covid-kemiskinan-di-jatim-meningkat-selama-maret-september-2020>, (diakses 25 September 2023).

¹⁰Merdeka.com, "Angka Kemiskinan di Jawa Timur Menurun, Ini Fakta di Balikny," *merdeka.com*, 2022, <https://www.merdeka.com/jatim/angka-kemiskinan-di-jawa-timur-menurun-ini-fakta-di-baliknya.html>, (diakses 25 September 2023).

angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dapat tercapai. Kondisi ini juga hasil dari pelaksanaan program pemulihan ekonomi yang dapat berjalan efektif. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, kondisi makro ekonomi Jawa Timur yang terus membaik pada Tahun 2021 memiliki dampak terhadap turunnya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu terdapat faktor lain di mana adanya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat, percepatan penyaluran dana desa, bansos yang disalurkan kepada masyarakat, serta pelaksanaan program-program pemerintah daerah lainnya.

Menekan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur perlu diupayakan menjadi program prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur karena kemiskinan merupakan inti dari semua permasalahan pembangunan¹¹. Kemiskinan adalah permasalahan global yang dihadapi oleh mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia. Penurunan angka kemiskinan menjadi permasalahan yang serius menjadi prioritas dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan kedua dalam dokumen Sustainable Development Goals (SDGs), sebagai komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun¹².

Penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan variabel – variabel penyebab kemiskinan, agar dapat menentukan program yang dapat tepat sasaran. Variabel – variabel penyebab kemiskinan di Indonesia seperti tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, penggunaan teknologi masih kurang, etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah, kultur/budaya (tradisi), dan politik yang belum stabil ini merupakan pengaruh dari kualitas hidup sumber daya manusia. Distribusi pendapatan yang tidak merata karena kesempatan kerja yang kurang merupakan pengaruh dari adanya pengangguran. Kesemua faktor tersebut di atas saling mempengaruhi dan sulit memastikan penyebab kemiskinan yang

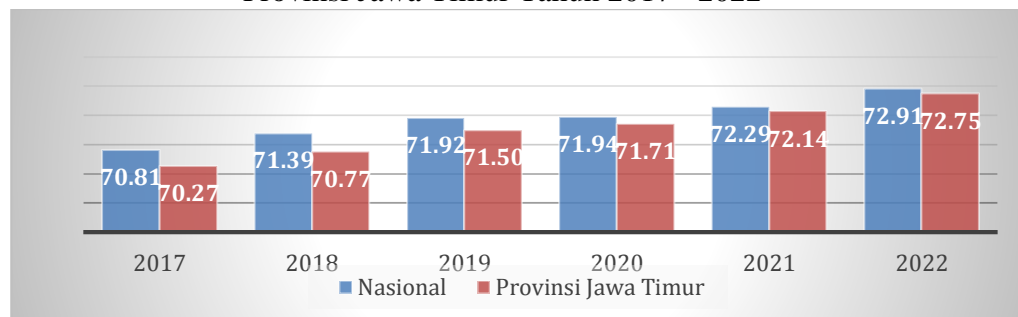
¹¹Stephen Todaro Michael P. dan Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2011), 10.

¹²Bappenas, *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi* (Jakarta: Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, 2018), 1.

paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Kesemua faktor tersebut merupakan vicious circle (lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan¹³.

Kemiskinan dipengaruhi salah satunya oleh kualitas hidup manusia. Menurut Mudrajad Kuncoro¹⁴ terdapat tiga faktor yang mengakibatkan munculnya kemiskinan dari sudut pandang ekonomi antara lain: pertama, kemiskinan timbul akibat ketidaksamaan kepemilikan sumber daya yang berdampak pada ketimpangan pendapatan. Mayoritas masyarakat miskin hanya mempunyai sumber daya alam yang sangat terbatas dan memiliki kualitas sumber daya alam yang rendah. Berikutnya, perbedaan kualitas sumber daya manusia menyebabkan kemiskinan. Ketiga, kemiskinan lahir akibat dampak dari ketimpangan akses permodalan. Indeks pembangunan manusia (IPM)¹⁵ dimanfaatkan untuk menjadi indikator capaian Pembangunan Manusia yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Gambar 1.3 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 - 2022



Sumber: <https://www.bps.go.id/site/resultTab> (data diolah)

Mengacu pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, IPM Jawa Timur sebesar 70,27 sedangkan IPM nasional sebesar 70,81. Lalu pada tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar 0,7% pada IPM Jawa Timur menjadi 70,77 dan IPM nasional mengalami peningkatan yang kecil, yakni 71,39. Pada tahun 2019, IPM Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 1,0% menjadi 71,5,

¹³Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 215.

¹⁴L. M. Fitri dan H. Aimon, "Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Sumatera Barat," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1.3 (2019), 771.

¹⁵Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia," Badan Pusat Statistik, 2023, <https://jambi.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>, (diakses 25 September 2023).

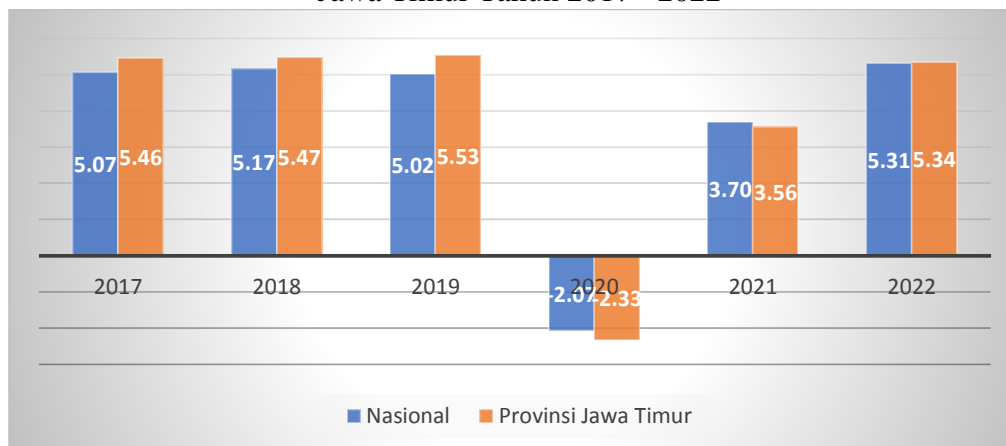
sedangkan IPM nasional naik tipis menjadi 71,92. Pada tahun 2020, IPM Jawa Timur naik sebesar 0,3% menjadi 71,71, sementara IPM nasional hanya naik sedikit menjadi 71,94. Pada tahun 2021, terjadi kenaikan IPM Jawa Timur sebesar 0,6% menjadi 72,14, sedangkan IPM nasional naik sedikit lebih tinggi menjadi 72,29. Pada tahun 2022, IPM Jawa Timur naik lagi sebesar 0,8% menjadi 72,75, sedangkan IPM nasional naik sedikit menjadi 72,91. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa IPM Jawa Timur masih berada di bawah IPM nasional dalam seluruh tahun yang diukur, namun, rata-rata pertumbuhannya lebih tinggi dari Nasional.

Dalam lima tahun terakhir, Rata-rata IPM Jawa Timur 71,77 dengan rata-rata pertumbuhan 0,70 persen, sedangkan rata-rata IPM nasional 72,09 dengan rata-rata pertumbuhan 0,59 persen. Namun, walaupun mengalami peningkatan yang signifikan, IPM Jawa Timur masih di bawah rata-rata IPM nasional. Peningkatan pada tahun 2018 hingga 2022 relatif stabil, dengan pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan IPM Jawa Timur di masa depan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu tolok ukur pembangunan di suatu daerah yang memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Toraja Utara menghasilkan data di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara¹⁶. Data ini menunjukkan dimana apabila kualitas hidup manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia pada suatu daerah tinggi, maka tingkat kemiskinan juga akan rendah. Kondisi ini membuktikan bahwa dimensi dasar komponen penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari: Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup dinilai layak atau baik, maka masyarakat tersebut dinilai mampu untuk lepas dari lingkup kemiskinan.

¹⁶Nella Vinni Batu Allo, Robby Joan Kumaat, dan Amran T. Naukoko, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Toraja Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23.6 (2023), 73.

Gambar 1.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 - 2022



Sumber: <https://www.bps.go.id/site/resultTab> (data diolah)

Mengacu pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur berada pada 5,46%, sedangkan Laju Pertumbuhan PDB Nasional berada pada 5,07%. Lalu pada Tahun 2018, Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur berada pada 5,47% berarti ada kenaikan 0,01% sedangkan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Nasional berada pada 5,17% berarti ada kenaikan yang lebih tinggi yaitu 0,10%. Selanjutnya pada Tahun 2019, laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 0,06% menjadi 5,53% sedangkan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto Nasional mengalami penurunan sebesar 0,15% menjadi 5,02%. Pada Tahun 2020 terjadi wabah covid 19 yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi perekonomian global sehingga terjadi pelemahan yang cukup signifikan dalam laju pertumbuhan PDB Nasional maupun PDRB Provinsi Jawa Timur. PDB Nasional mengalami penurunan sampai dengan -7,09% menjadi -2,07% sedangkan Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sampai dengan -7,86% menjadi -2,33%. Kondisi ini membuat Pemerintah pusat membuat Kebijakan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menghambat penyebaran virus Covid-19 dan tetap memberikan ruang pada aktivitas perekonomian. Kebijakan ini membuahkan hasil dimana pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan PDB Nasional mengalami kenaikan sebesar 5,77% sehingga

menjadi 3,70% sedangkan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 5,89% sehingga menjadi 3,56%. Kondisi ini semakin membaik akan tetapi kenaikan belum signifikan di Tahun 2022. Laju Pertumbuhan PDB Nasional mengalami kenaikan sebesar 1,61% sehingga menjadi 5,31% sedangkan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur kenaikan sebesar 1,78% sehingga menjadi 5,34%.

Dalam enam tahun terakhir tren rata - rata Laju Pertumbuhan PDB Nasional sebesar 3,70% sedangkan rata – rata Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur 3,84%. Tren ini menunjukkan kestabilan aktivitas ekonomi di Indonesia dan Provinsi Jawa Timur mampu untuk menanggulangi dampak Covid -19. Akselerasi ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 ditopang oleh berlanjutnya upaya efektif penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi yang mendorong perluasan pembukaan sektor ekonomi produktif. Di samping itu, perbaikan ekonomi Jawa Timur tahun 2022 turut didukung oleh percepatan penyelesaian proyek-proyek yang terdapat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.80 Tahun 2019. Hal tersebut mendorong akselerasi konsumsi RT dan investasi. Permintaan global yang masih tinggi pada komoditas ekspor luar negeri utama Jawa Timur, yakni emas/perhiasan serta lemak dan minyak hewani/nabati juga turut mendukung lebih tingginya ekspor luar negeri Jawa Timur pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan permintaan domestik dan masih positifnya permintaan eksternal tersebut mendorong akselerasi lapangan usaha utama di Jawa Timur, yakni lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan¹⁷.

Penurunan angka kemiskinan juga dapat ditunjang melalui aktivitas ekonomi. Menurut Todaro¹⁸, Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah

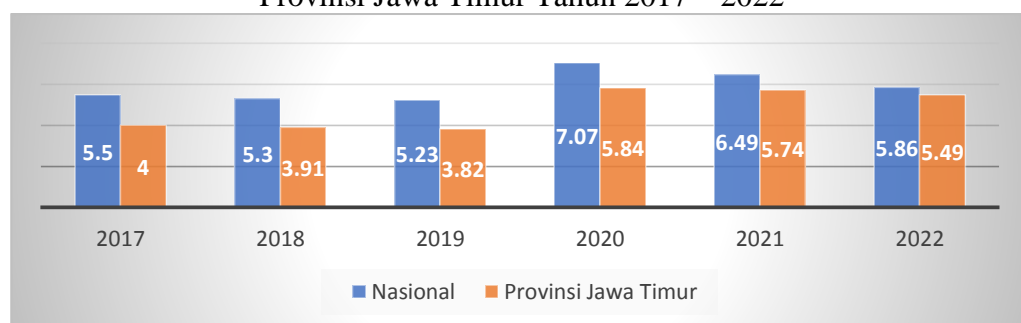
¹⁷Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, *LAPORAN PEREKONOMIAN Provinsi Jawa Timur Februari 2023* (Surabaya: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2023).

¹⁸T. N. Zebua, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara (2011-2020),” Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents, 2.3, (2022), 438.

keseluruhan dari nilai hasil akhir yang diperoleh dari ekonomi pada tingkat regional, terlepas dari apakah produk tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat atau individu yang berada di daerah lain tetapi beroperasi pada wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam suatu negara dapat tercermin melalui tingginya Produk Domestik Regional Bruto¹⁹. Aktivitas ekonomi yang mengalami pertumbuhan menandakan lahirnya mekanisme peningkatan produksi di mana kondisi ini mendukung terciptanya lapangan pekerjaan yang turut serta menyerap tenaga kerja hingga pada akhirnya menekan laju jumlah pengangguran sehingga mengurangi angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh daerah-daerah di dalam negara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dinilai dari nilai *Gross Regional Domestic Product* atau Produk Domestik Regional Bruto. Peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto menjadi parameter penting yang mengindikasikan capaian atas pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Penelitian yang dilaksanakan di 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menghasilkan kesimpulan di mana Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan negatif pada tingkat kemiskinan²⁰.

Gambar 1.5 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2022



Sumber: <https://www.bps.go.id/site/resultTab> (data diolah)

¹⁹B. H. Kusumo, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 10.2 (2022), 1.

²⁰Baskoro Herlambang dan Nilam Septi Ariria Rachmawati, “Pengaruh PDRB, IPM, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur,” *Ekonomi dan Bisnis: Berkala Publikasi, Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian, dan Terapan Teori*, 27.1 (2023), 52.

Mengacu pada gambar di atas, dapat kita lihat bahwa tren Tingkat Pengangguran Terbuka baik di Indonesia maupun Provinsi Jawa Timur sama menunjukkan penurunan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang diakibatkan oleh dampak Covid 19 pada tahun 2020. Pada Tahun 2021 pemulihan ekonomi yang terus tumbuh memberi dampak positif pada berbagai sektor di Jawa Timur. Salah satunya ialah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Meskipun sudah mengalami penurunan akan tetapi masih belum signifikan sehingga masih diperlukan penguatan kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, komunitas dan masyarakat. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain: pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja muda sebagai salah satu kunci meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja serta mendorong fungsi penempatan tenaga kerja melalui fasilitasi pembinaan dan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun ke luar negeri.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Faktor kemiskinan dan pengangguran seringkali dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Kedua permasalahan ini mempunyai hubungan dengan dampak pembangunan manusia yang terdapat dalam suatu daerah. Apabila penduduk suatu wilayah mengalami kondisi kemiskinan maka penduduk tidak dapat memperbaiki kualitas sumber dayanya karena tidak mampu menjangkau karena adanya keterbatasan pendapatan. Tingkat kualitas sumber daya manusia yang rendah memiliki dampak sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Pengangguran akan mengakibatkan dalam menurunnya pendapatan masyarakat²¹, sehingga tingkat kesejahteraan akan menurun yang pada akhirnya juga memperparah tingkat kemiskinan. Pengangguran juga permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Hal ini mengingat jumlah kepadatan penduduk Indonesia yang terus bertambah dan tidak diiringi dengan minimnya permintaan tenaga kerja.

²¹Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Depok: Kencana, 2016), 199.

Salah satu penelitian yang dilakukan di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara mengemukakan bahwa pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan²². Dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa pengangguran dan kemiskinan memiliki korelasi positif di mana apabila pengangguran naik maka akan diikuti oleh kenaikan angka kemiskinan. Kondisi ini membuat apabila ada seseorang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan yang pada akhirnya tidak mampu mencukupi kebutuhan. Saat kebutuhan tidak tercukupi maka orang tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berdasarkan pada fenomena yang telah dianalisis, maka diperlukan penelitian terkait beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur agar dapat diketahui faktor - faktor yang perlu diperhatikan untuk mengatasi masalah kemiskinan khususnya ditinjau dari persepektif ekonomi syariah. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan *stake holder* lainnya untuk menekan laju angka kemiskinan. Berikut faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhah Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka. Mengacu kondisi tersebut, judul untuk penelitian ini yaitu Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Dari Perspektif Ekonomi Syariah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2022.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, identifikasi permasalahan pada peneilitian ini adalah:

²²Murbanto Sinaga et al., “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias,” *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5.1 (2023), 140.

- a. Indeks Pembangunan Manusia yang rendah memiliki dampak terhadap peningkatan Angka Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 – 2022
- b. Pertumbuhan Ekonomi yang rendah memiliki dampak terhadap peningkatan Angka Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 – 2022
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka yang meningkat memiliki dampak terhadap peningkatan Angka Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 – 2022
- d. Indeks Pembangunan Manusia yang rendah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka yang meningkat secara simultan memiliki dampak terhadap peningkatan Angka Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 – 2022

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan di atas, penelitian ini hanya membatasi masalah pada faktor – faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang terdiri dari: Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka

C. Rumusan Masalah

Dari paparan konteks penelitian di atas, maka fokus masalah yang diteliti terkait dengan penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 – 2022?
2. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 – 2022?

3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 – 2022?
4. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 – 2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin peneliti kemukakan merupakan sebagai berikut:

1. Untuk Menguji Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 – 2022.
2. Untuk Menguji Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 – 2022.
3. Untuk Menguji Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 – 2022.
4. Untuk Menguji Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 – 2022.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan ekonomi, khususnya pengetahuan ekonomi pembangunan, dari perspektif ekonomi syariah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan adalah kemampuan untuk menyelesaikan studi tentang kemiskinan dari perspektif Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menginformasikan hasil penelitian yang dimanfaatkan sebagai landasan pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Bruto Regional, Tingkat Pengangguran Terbuka, untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Selain Pemerintah, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti harus memperjelas definisi dari istilah-istilah tersebut. Dalam penegasan istilah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Definisi Konseptual

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan parameter yang berdasarkan pada komparasi dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan bagaimana masyarakat mampu menjangkau hasil pembangunan untuk mendapatkan penghasilan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia mempunyai banyak manfaat²³, antara lain:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting dalam rangka mengukur capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Indeks Pembangunan Manusia mampu mengukur peringkat atau level pembangunan dalam suatu wilayah bahkan negara

²³Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia", *Badan Pusat Statistik*, 2023, <https://www.bps.go.id>, (diakses 26 September 2023)

3) Bagi Pemerintah Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia merupakan data yang penting, hal ini disebabkan sebagai ukuran kinerja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia juga dimanfaatkan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan parameter yang diambil dari komparasi antara jumlah penduduk yang masuk dalam kategori menganggur terhadap jumlah angkatan kerja²⁴. Angkatan Kerja merupakan kelompok masyarakat dengan usia kerja yaitu rentang usia 15 tahun ke atas yang sudah bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu:

- 1) penduduk yang sedang aktif untuk mendapatkan pekerjaan
- 2) penduduk yang sedang merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan untuk usaha/pekerjaan baru
- 3) penduduk yang tidak berusaha untuk mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan

²⁴Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka," *www.bps.go.id*, last modified 2023, diakses September 26, 2023, <https://www.bps.go.id/>.

- 4) golongan penduduk yang pasif untuk memperoleh pekerjaan karena sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

d. Kemiskinan

Kemiskinan atau miskin merupakan suatu kondisi di mana golongan masyarakat tertentu yang belum atau tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga merupakan akibat dari kesulitan menjangkau akses terhadap pendidikan dan pekerjaan²⁵.

e. Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental syariah yang bersumber dari ajaran agama Islam, nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku universal di semua bidang kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi dan keuangan. Ekonomi Syariah adalah cara Islam (secara khusus) dalam memberikan jawaban - jawaban dari Allah SWT terhadap permasalahan - permasalahan Ekonomi (kemiskinan) baik dalam hal kehidupan personal maupun kehidupan bernegara²⁶.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional memuat variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Nama Variabel	Definisi Operasional Variabel	Satuan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (X1)	Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini diperoleh dari	Indeks

²⁵Wikipedia, "Kemiskinan," *id.wikipedia.org*, 2023, Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>, (diakses 26 September 2023).

²⁶Amiruddin Kadir, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2014).

			laporan yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai besarnya indeks pembangunan manusia (IPM) menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2022	
2.	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (X2)	Data Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini diperoleh dari laporan yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai besarnya indeks pembangunan manusia (IPM) menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2022	Persentase
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (X3)	Data Tingkat Pengangguran Terbuka dalam penelitian ini diperoleh dari laporan yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai besarnya	Persentase

			Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2022	
4.	Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (Y)	Angka kemiskinan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai besarnya Angka Kemiskinan menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017-2022	Persentase